

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan layanan publik, efisiensi birokrasi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Ini melibatkan penerapan sistem informasi dan *platform online* untuk memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan pemerintah. Berkembangnya SPBE di era globalisasi, telah mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan pemerintahan yang lebih baik (*Good Governance*). Penerapan ini akan berimplikasi terhadap pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Maka dari itu agar pencapaian yang ideal tersebut, pemerintah perlu memperbaiki sistem birokrasi yang ada. (Kurniasih, D., Fidowaty, T., & Sukaesih, P. 2013:6).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mengatur tentang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan maksud mengatur penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam administrasi pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mengelola pengembangan, operasi, dan manajemen SPBE di Indonesia. SPBE dimaksudkan untuk mengawasi tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab, serta untuk memberikan pelayanan publik yang bermutu dan dapat dipercaya. Peraturan

ini juga menetapkan integrasi layanan SPBE antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengatur manajemen risiko, keamanan informasi, dan perubahan dalam pengelolaan SPBE.

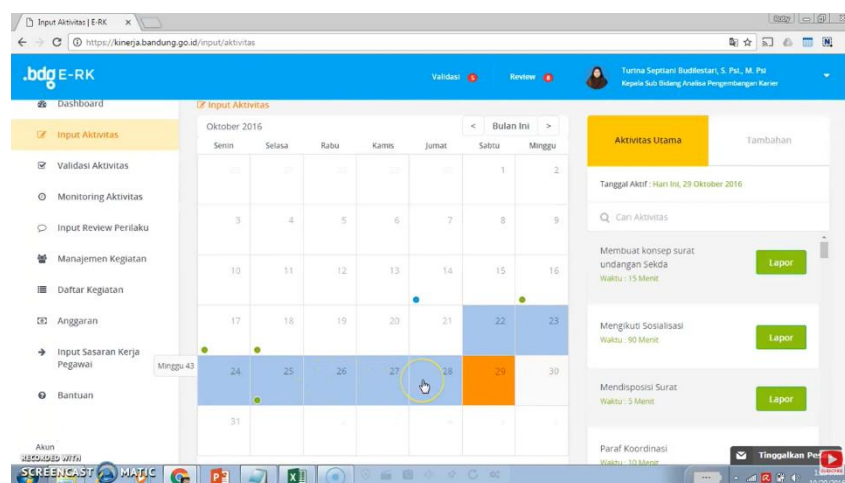
BKPSDM Kota Bandung, singkatan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung, adalah badan teknis di wilayah otonom Kota Bandung yang bertanggung jawab atas manajemen ASN di kota Bandung. Tugas utamanya adalah mengelola dan mengembangkan sistem manajerial ASN. Oleh karena itu, kualitas kinerja ASN di Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh cara BKPSDM Kota Bandung yang mengelola dan mengembangkannya. Prestasi ASN Kota Bandung yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki integritas merupakan faktor kunci bagi keberhasilan sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini tercermin melalui tingkat dukungan publik terhadap hasil laporan kinerja ASN dalam menjalankan birokrasi di Kota Bandung. Upaya untuk menciptakan ASN yang unggul dan berintegritas sesuai dengan visi Kota Bandung, yaitu "Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Agamis", diwujudkan melalui misi BKPSDM Kota Bandung untuk "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, dan Bersih".

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru berupa program berbasis elektronik seperti sistem atau aplikasi untuk mempertahankan akuntabilitas publik dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat secara lebih efektif. Kebijakan ini telah diterapkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, meskipun belum secara menyeluruh. Pemerintah Kota

Bandung sebagai pelaksana kebijakan tersebut perlu memaksimalkan sistem pengukuran kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan adanya sistem remunerasi kinerja yang telah beralih menjadi sistem manajemen kinerja, diharapkan kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai bahwa Manajemen Bandung Kinerja yang kemudian disingkat Mang Bagja adalah website yang memuat mekanisme penilaian kinerja pegawai melalui sistem elektronik. Website Mang Bagja merupakan hasil penyempurnaan dari website Elektronik Remunerasi Kinerja (E-RK). Dimana E-RK merupakan generasi awal website penilaian kinerja ASN Kota Bandung. Hal ini karena, perubahan regulasi terkait dengan sistem manajemen ASN dan kebutuhan ASN Kota Bandung terhadap hasil output laporan kinerja yang komperhensif. Berikut merupakan tampilan dari Elektronik Remunerasi Kinerja (E-RK) :

Gambar 1.1
Tampilan Elektronik Remunerasi Kinerja (E-RK)

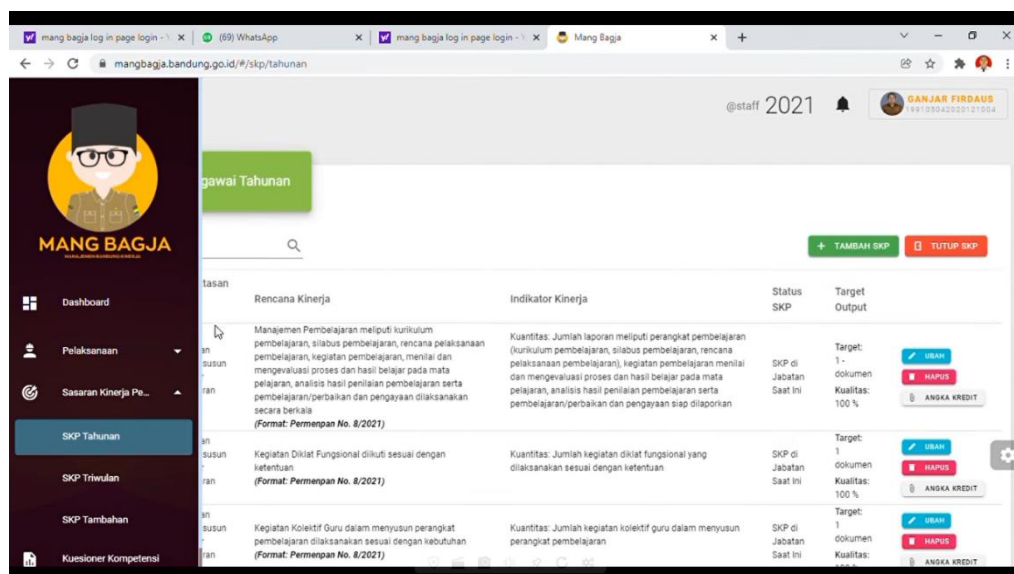


(Sumber : BKPSDM Kota Bandung 2019)

Implementasi Sistem Manajemen Bandung Kinerja (Mang Bagja) di BKPSDM Kota Bandung telah menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan kinerja aparaturnya. Sebagai landasan utama, Mang Bagja bertujuan untuk mengubah paradigma kerja aparaturnya ke arah efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Dengan penerapan Mang Bagja, aparaturnya memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, yang akhirnya memperkaya produktivitas secara signifikan. Mang Bagja juga mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih profesional di BKPSDM Kota Bandung. Adanya Mang Bagja telah mengubah cara aparaturnya dalam merespon tuntutan masyarakat dengan lebih cepat dan tepat.

Berikut merupakan tampilan dari sistem Mang Bagja :

Gambar 1.2
Tampilan Mang Bagja



(Sumber : BKPSDM Kota Bandung 2021)

Sistem Manajemen Bandung Kinerja (Mang Bagja) ini dibuat untuk merealisasikan sistem pemerintahan terbuka yang bertujuan agar dapat

mengoptimalkan sistem penilaian kinerja ASN Kota Bandung yang objektif serta menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga hasil pelaporan kinerja ASN yang tervalidasi pada sistem ini menjadi lebih transparan dan akuntabel. Sistem ini juga akan berdampak kepada jangka pendek dan jangka Panjang, dalam jangka waktu pendek hasil laporan ini dapat mengakumulasi nominal Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) setiap bulannya, sehingga kuantitas besaran TKD dapat tercantum didalam sistem tersebut. Sedangkan dalam jangka waktu Panjang sistem ini dapat menjadi alat untuk indikator didalam pemetaan jabatan atau karir ASN Kota Bandung. ASN melaporkan aktivitas harian sesuai dengan SKP yang telah disusun paling sedikit 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit setiap bulannya. Perhitungan batas minimal pelaporan aktivitas harian pada bulan-bulan tertentu, ditentukan sesuai dengan hari kerja efektif. Waktu pengisian aktivitas harian pada system Mang Bagja ditetapkan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB hari berikutnya, namun terdapat pula batas waktu pengisian aktivitas yaitu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pelaksanaan aktivitas harian dan tidak melebihi akhir bulan berkenaan. Atasan langsung selaku Pejabat Penilai kinerja melakukan validasi atas laporan aktivitas bawahan selaku pejabat yang dinilai.

Sistem Manajemen Bandung Kinerja (Mang Bagja) ini di implementasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung sebagaimana program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Kota Bandung dan mulai diimplementasikan pada tahun 2016 yang menimbulkan beberapa perspektif dari para ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai objek dari adanya sistem Manajemen Bandung Kinerja (Mang Bagja).

Berdasarkan fenomena awal yang peneliti lakukan di BKPSDM Kota Bandung, peneliti menemukan permasalahan terkait dengan transparansi, meskipun website Mang Bagja yang dirancang oleh BKPSDM Kota Bandung menyediakan informasi yang transparan untuk ASN. Namun, optimalisasinya belum tercapai karena di lapangan masih ada hambatan. Salah satunya adalah server website yang sering mengalami error sehingga laporan kinerja tidak tervalidasi. Kesalahan sistem ini terjadi akibat server overload, biasanya karena banyak ASN yang mengakses untuk mengisi laporan kinerja pada waktu yang bersamaan, yaitu antara waktu magrib hingga isya, setelah jam pulang kantor.

Laporan penilaian kinerja pegawai saat ini diperlukan untuk mengetahui capaian pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, apakah sudah mencapai maksimal sesuai harapan atau belum sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah dan diharapkan masyarakat. Ketidaksesuaian itu disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan dalam penerapan sistem, seperti ketidaksetaraan pemberian tunjangan terhadap pegawai yang kinerjanya tidak terukur, banyak pengisian sistem dilakukan oleh operator bukan pegawai itu sendiri, serta penilaian atau validasi nilai yang subjektif dalam pengisian input aktivitas dan perilaku pegawai. Sistem remunerasi kinerja dapat menjadi alat ukur bagi peningkatan kualitas kinerja pegawai pemerintah daerah. Diawali dengan menimbang gejala-gejala timbulnya permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan integritas dan akuntabilitas publik.

Penelitian yang sama pernah dilakukan oleh beberapa orang, yang pertama dilakukan oleh Kusniadi Widjaya (2022:40) dengan judul Pengaruh Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bandung, Hasil analisis data menunjukkan bahwa Motivasi memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kinerja pegawai karena Motivasi adalah kekuatan yang mampu mengubah sikap dan perilaku pegawai agar mereka dapat bekerja secara efektif, efisien, dan berkualitas. Tingkat motivasi yang diberikan oleh pimpinan akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja pegawai.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yayan (2021:1220) dengan judul Analisis Pengaruh Semangat Kerja, Promosi Jabatan dan Kompetensi Terhadap Kinerja ASN Di Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis data validitas, reliabilitas dan uji asumsi klasik, kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda, uji determinasi, uji simultan dan uji parsial. Temuan hasil penelitian ini secara simultan variabel Semangat Kerja, Promosi Jabatan dan Kompetensi berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas kinerja. sedangkan secara parsial hanya dua variabel independen yang berpengaruh positif yaitu variabel semangat kerja dan variabel kompetensi, sedangkan variabel promosi jabatan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja, hal ini dipengaruhi oleh indikator lain di luar analisis penelitian ini.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Shela Marlian (2020:208) dengan judul Implementasi Kebijakan Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari perspektif kebijakan, SASIKAP telah berhasil menetapkan standar dan tujuan kebijakan yang ingin dicapai, Secara keseluruhan,

Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana kebijakan sudah memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai dalam menggunakan aplikasi SASIKAP, mulai dari proses pelaporan hingga penilaian kinerja, meskipun terkadang menghadapi kendala teknis tertentu. Dengan adanya SASIKAP, aktivitas kerja pegawai menjadi lebih terstruktur dan direncanakan. Respons positif ini juga didukung oleh kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif. Hal ini terbukti dengan adanya dukungan pemenuhan kebutuhan pengembangan aplikasi dan elemen pendukungnya dari tahun ke tahun.

Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih, D., Fidowaty, T., & Sukaesih, P. (2013). Dengan judul Pengaruh Implementasi Kebijakan E-Government Terhadap Kinerja Aparatur Kota Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-Government memberikan pengaruh sebesar 54,85% terhadap kinerja aparatur pemerintah di Kota Cimahi, sedangkan sisanya sebesar 45,15% merupakan pengaruh faktor-faktor lain. Hal tersebut memberikan bukti empiris bahwa semakin baik implementasi kebijakan e-Government maka semakin meningkat kinerja aparatur pemerintah di Kota Cimahi. Komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, serta struktur birokrasi telah memberikan kontribusi yang berarti terhadap keberhasilan kebijakan. Hal yang paling dominan dalam implementasi kebijakan ini adalah konsistensi sikap implementor sejak perencanaan sampai dengan pengawasan mulai tingkat pimpinan puncak sampai pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Dari keempat penelitian terdahulu tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dalam objek penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara, sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajiannya. Karena sampai saat ini masih sangat minim penelitian yang dilakukan dan dipublikasikan terkait dengan Mang Bagja. Oleh karena itu, kebaruan dari penelitian ini terletak pada bagaimana menggambarkan kondisi implementasi kebijakan secara holistik dari berbagai sudut pandang. Mengingat kondisi BKPSDM Kota Bandung sebagai salah satu lembaga teknis yang bertanggung jawab atas manajemen ASN, tentu saja tidaklah mudah untuk mewujudkan kebijakan yang cukup tegas dalam mengubah pola kerja pegawai. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Manajemen Bandung Kinerja (Mang Bagja) Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat disusun identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan sistem Manajemen Bandung Kinerja (Mang Bagja) di BKPSDM Kota Bandung ?
2. Bagaimana kinerja aparatur sipil negara di BKPSDM Kota Bandung ?
3. Bagaimana hubungan dan besarnya pengaruh antara implementasi kebijakan sistem Manajemen Bandung Kinerja (Mang Bagja) terhadap kinerja aparatur Sipil Negara BKPSDM Kota Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dengan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjawab, dan menjelaskan tentang :

1. Implementasi kebijakan sistem Manajemen Bandung Kinerja (Mang Bagja)
2. Kinerja aparatur sipil negara BKPSDM Kota Bandung.
3. Hubungan dan besarnya pengaruh antara implementasi kebijakan sistem Manajemen Bandung Kinerja (Mang Bagja) terhadap kinerja aparatur sipil negara BKPSDM Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta dapat memperkaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada kajian implementasi kebijakan dan juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang ilmu pemerintahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan serta pengaplikasian kelimuan bagi peneliti dalam bidang pemerintahan.

2. Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan UNIKOM

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumbangan informasi bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung secara umum, dan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi Ilmu Pemerintahan secara khusus sebagai literatur, terutama bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai implementasi kebijakan pemerintah.

3. Bagi BKPSDM Kota Bandung

Penelitian ini berguna bagi BKPSDM Kota Bandung sebagai informasi, evaluasi, dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat serta sebagai motivasi dalam melaksanakan kegiatan kegiatan selanjutnya.